**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA
TANJUNG MEDAN KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN
ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam Riau

Ayu Amelia

NPM: 177110373

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si selaku Dekan FISIPOL Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan jajaran Dosen pada jurusan Administrasi Publik yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan Skripsi.
4. Bapak Arief Rifai Harahap.,S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing yang telah yang telah menyediakan waktu dan membagi pengetahuan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini terhadap apa yang telah di arahkan dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
5. Terkhusus dan istimewa ucapan terimakasih yang tiada hingga penulis persembahkan kepada ayahanda Amin Mahfud, Ibunda Jumiati yang selalu memberikan semangat, limpahan kasih sayang yang tiada henti dan selalu memberikan do'a serta dukungan baik secara moril dan materil kepada saya untuk menyelesaikan usulan penelitian ini.
6. Orang yang paling penulis kasihi, Sofyan Sopiyan Daulay S.Pd, yang selalu memberikan dukungan, semangat, perhatian serta menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau, terimakasih untuk selalu sabar,dan selalu mengerti.

7. Teman- teman seperjuangan angkatan 2017 jurusan Administrasi Publik terutama kelas Administrasi Publik B yang telah memberikan dukungan kepada saya.

8. Dan Terimakasih untuk diri sendiri yang mampu bertahan dan berjuang sehebat ini, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak cobaan yang datang tanpa berhenti, dan terimakasih sudah berkean mendengar jiwa butuh apa

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Aamiin.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Pekanbaru, 16 November 2021
Penulis,

Ayu Amelia

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
BRITA ACARA KONFREHENSIF.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
SURAT PERNYATAAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACK.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	20
A. Studi Kepustakaan	20
1. Konsep Administrasi.....	20
2. Konsep Organisasi	24
3. Konsep Manajemen.....	26
4. Konsep Evaluasi.....	32
5. Konsep Badan Usaha Milik Desa	38
6. Tugas Dan Fungsi	40
B. Kerangka Pikir	42
C. Konsep Operasional.....	43
D. Operasionalisasi Variabel	46
E. Teknik Pengukuran	48
BAB III: METODE PENELITIAN.....	52
A. Tipe Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Populasi dan Sampel	53
D. Teknik Penarikan Sampel	55
E. Jenis dan Sumber Data.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	57
G. Teknik Analisis Data	58
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	59
BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	61

A. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu.....	61
B. Profil Desa Tanjung Medan	63
C. Profil BUMDes Kembang Setanjung.....	64
BAB V: Hasil Penelitian Dan Pembahasan	66
A. Identitas Responden	66
1. Identitas Responden Berdasarakan Jenis Kelamin	67
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia	68
3. Identitas responden berdasarkan pendidikan	69
4. Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan	70
B. Hasil dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	71
1. Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat Desa	72
2. Meningkatkan Kreatifitas Dan Peluang Usaha Ekonomi Produktif	75
3. Mendorong Berkembangnya Usaha Mikro.....	78
4. Sebagai Sumber Dana Yang Dialokasikan Untuk Kepentingan Masyarakat	81
5. Meningkatkan Kesempatan Berusaha.....	84
6. Membantu Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan	86
7. Membuka Lapangan Kerja.....	89
C. Hambatan-hambatan Yang Mempengaruhi Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	95
BAB VI.....	98
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
DAFTAR LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Nama-Nama Kepengurusan BUMDes Kembang Setanjung Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	11
I.2	: Pinjaman modal kerja di BUMDes Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	14
I.3	: Data pinjaman yang bermasalah pada BUMDes Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	16
II.1	: Operasionalisasi variabel penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	46
III.3	: Jadwal penelitian Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	59
V.1	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin	67
V.2	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Nasabah BUMDes	68
V.3	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Nasabah BUMDes	69
V.4	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Pekerjaan Nasabah BUMDes	70
V.5	: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat Desa	72
V.6	: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Meningkatkan Kreatifitas dan Peluang Usaha Ekonomi Produktif	75
v.7	: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Mendorong Berkembangnya Usaha Mikro	79

V.8	: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Sebagai Sumber Dana Yang Dialokasikan Untuk Kepentingan Masyarakat.....	82
V.9	: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Meningkatkan Kesempatan Berusaha	84
V.10	: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Membantu Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan	87
V.11	: Distribusi Tanggapan Responden Membuka Lapangan Kerja.....	89
V.12	: Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Nasabah Terkait Penelitian Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utra Kabupaten Rokan Hulu	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Model kerangka piker Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	43

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Amelia
NPM : 177110373
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah- kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 November 2021
Pelaku Pernyataan,

Ayu Amelia

EVALUASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU

ABSTRAK

AYU AMELIA

BUMDes merupakan pilar ekonomi didesa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social instution) dan komersil (commercial instution). Berarti BUMDes adalah lembaga yang memprioritas kepentingan masyarakat melalui partisipasi dalam penyediaan pelayanan sosial masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini untuk megetahui Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena dan kejadian yang berlangsung di lapangan pada saat tertentu, metode pengambilan data di lakukan dengan observasi atau penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan dan menggambarkan gejala-gejala secara lengkap tentang aspek yang diteliti. Penelitian Karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yakni metode penelitian yang berdasarkan pikiran-pikiran dan tanggapan informan penelitian mengenai permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu “ cukup baik “ dari jumlah total keseluruhan responden sebanyak 86 orang responden. Perlunya sikap tegas yang akan dikeluarkan oleh pihak BUMDes dan Unit Usaha Simpan Pinjam dalam pengawasan yang dilakukan kepada pihak yang menunggak di unit USP sehingga unit USP terbebas dari tunggakan yang tergolong besar.

Kata Kunci : BUMDes, Deskriptif, Kuantitatif

**EVALUATION OF THE MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED
ENTERPRISES IN TANJUNG MEDAN VILLAGE, NORTH TAMBUSAI
DISTRICT OF ROKAN HULU REGENCY**

ABSTRACT

AYU AMELIA

BUMDes is an economic pillar of the state that serves as a social institution (social instution) and commercial (commercial instution). Bumdes is an institution that prioritizes the interests of the community through participation in the provision of social services of rural communities. The purpose of this study is to know the Evaluation of The Management of Village Owned Enterprises. This research is a type of descriptive research, which is research that describes or describes phenomena and events that take place in the field at a certain moment, the method of data retrieval is done by observation or direct research to obtain data by using and describing the symptoms in full about the aspects studied. This scientific work uses quantitative approach methods that are research methods based on the thoughts and responses of research informants about the problems studied. From the results of research that has been conducted on the Evaluation of The Management of Village Owned Enterprises in Tanjung Medan Village, North Tambusai District of Rokan Hulu Regency is "quite good" from the total number of respondents as many as 86 respondents. . The need for a firm stance that will be issued by BUMDes and The Save and Borrow Business Unit in supervision carried out to delinquent parties in THE USP unit so that the USP unit is free from large arrears.

Keywords: BUMDes, Descriptive, Quantitative

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi apa yang disebut “ administrasi “ adalah mengurus, mengatur, mengelola, jika di bubuhi oleh awalan pe dan akhiran an paa setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturannya dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Menurut Ali (2004:12) administrasi adalah kerja sama manusia yang tidak saja didasarkan pada pertimbangan rasio, tetapi juga atas dasar realistik empirik tentang esensi eksistensi manusia dalam pencapaian tujuan bersama.

Dalam menjalankan administrasi maka diperlukan sebuah organisasi sebagai wadah untuk menjalankan administrasi tersebut, organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sekumpulan individu dalam satu kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah diciptakan secara struktural. Dalam pencapaian sebuah tujuan dalam organisasi diperlukan adanya manajemen, yang merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien yang tentunya menggunakan tenaga orang.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu

dibagi atas Daerah Kabupaten Kota. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 dikatakan Daerah Kabupaten Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa asal 87, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Permendes No. 04 Tahun 2015 pasal 2 Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk

berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Kebutuhan potensi Desa adalah Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Tersedia sumberdaya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa dan Tersedia Sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi Warga Masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Desa dan Masyarakat.

Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2014

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Desa
2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro
Meningkatkan sumber pendapatan Asli Desa (PADes)
4. Sebagai sumber dana yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat
5. Meningkatkan kesempatan berusaha
6. Membantu Pemerintah Desa dalam Menaggulangi Kemiskinan
7. Membuka lapangan Kerja

BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution) BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan BUMDes sebagai badan hukum. Dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat Desa. Dengan demikian bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing Desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui peraturan daerah.

Menurut Permendes No. 02 Tahun 2015 pasal 2 Pendirian BUMDes dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan atau Kerja sama antar Desa.

Tugas dan peran pemerintah adalah Melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat Desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah Desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung didirikan pada tanggal 28 april 2015, dimana Kantor BUMDes ini berada di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa. Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa.

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam peningkatan pendapatan Asli Desa (PADesa). Berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Memperluas pemerataan pembangunan pembangunan dan hasil-hasilnya. Termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja. Oleh karna itu, setiap pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDES didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat di kembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosia, sedangkan lembaga komersial berjuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efesiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan BUMDes sebagai badan hukum. Dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan

kesepakatan yang terbangun di masyarakat Desa. Dengan demikian bentuk BUMDes dapat beragam di setiap Desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing Desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui peraturan Daerah.

Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat Desa melalui pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah Desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Desa. Untuk itu masyarakat Desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik Desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpuat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat Desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, DII).

Melalui cara demikian diharapkan Keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah Desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan

standar pelayanan minimal (SPM). Sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas Desa yang lebih berdaya.

Keberadaan BUMDes adalah amanah dari Undang-Undang Desa No 6A Tahun 2014. Undang-Undang Desa, ini menjadi payung hukum bagi pendirian BUMDes sebagai pelaku ekonomi untuk mengelola potensi desa secara kolektif guna meningkatkan kesejahteraan desa dan warganya. Sebelum lahirnya UU Desa, istilah BUMDes ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 dan rinciannya teknisnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010. Namun sampai saat ini, hanya sedikit desa di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi mampu mendirikan BUMDes. Kalaupun ada desa yang menjalankan dengan prinsip dan tujuannya sama. Namun nama kegiatan/usahnya berbeda-beda. Misalnya, seperti di daerah kita Kabupaten Rokan Hulu melalui UED/K – SP, namun dengan berdirinya BUMDes nanti, UED/K - SP dapat menjadi bagian dari usaha BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha berbadan hukum publik mandiri yang tangguh yang memiliki dasar pembentukan BUMDes yaitu :

- a. Adanya surat permintaan kabupaten tentang hasil evaluasi dan surat pelepasan manajemen program dari propinsi.
- b. Adanya surat dari propinsi riau yang menyatakan desa tersebut telah di evaluasi dan pelepasan manajemen program yang menyatakan usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) tersebut sehat dan mandiri serta di nyatakan siap untuk di lepas menjadi BUMDes.

- c. Berdasarkan poin 2 di atas maka pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyurati desa bersangkutan agar melaksanakan musyawarah pembentukan BUMDes

Organisasi pengelola BIMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, paling sedikit terdiri atas penasehat atau komisaris dan pelaksanaan operasional atau direksi. Penasihat atau komisaris dijabat oleh Kepala Desa dan pelaksana operasional atau direksi terdiri dari direktur dan Kepala unit usaha. Persyarakatan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:

- a. Masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
- d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

Dalam menjalankan badan Usaha Milik Desa tersebut komisaris dan pelaksana operasional di haruskan berkoordinasi guna terlaksanannya Badan Usaha Milik Desa tersebut. Koordinasi yang dapat di lakukan oleh komisaris dan pelaksana operasional di antara nya adalah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilakukan minimal 4 (empat) bulan sekali yang melibatkan Kepala desa Dusun, ketua RT dan RW, serta tokoh masyarakat yang mana Rapat Koordinasi ini membahas tentang perkembangan dari semua unit usaha yang terdapat di BUMDes tersebut. Selain itu rapat Koordinasi rutin minimal sebulan sekali juga dilakukan oleh intern BUMDes.

Berdasarkan tugas Kepala unit usaha pada ADART pasal 13 ayat 1 huruf a yaitu mengembangkan an membina Badan Usah Milik Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat. Kemudian ini juga selaras dengan apa yang dinyatakan dalam petunjuk pedoman pembinaan yaitu 1. Pemerian bimbingan, 2. Supervise, 3. Konsultasi Pelaksanaan urusan (miftah toha, 2010:207).

Oleh sebab itu kepala setiap pengelola BUMDes seharusnya dapat memberikan suatu bimbingan kepada setiap masyarakat peminjam dana yaitu baik berupa arahan maupun petunjuk untuk penggunaan dana, agar dapat mengembangkan usahanya bukan hanya dalam bidang pertanian (perkebunan) melainkan dalam bidang usaha lainnya (berdagang).

Adapun maksud dan tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang Setanjung menurut anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADART Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang Setanjung ialah:

a. Maksud

Segala usaha desa, guna mendorong atau penampungan seuruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diselenggarakan untuk dikelola oleh masyarakat.

b. Tujuan

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat

2. Meningkatkan Kreativitas dan peluang ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa yang terbebas dari pengaruh pelepasan uang/rentenir.
4. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan member pelayan terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan Kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
6. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan suatu kesatuan ekonomi masyarakat desa.

Bentuk kegiatan yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu saat ini adalah Simpan Pinjam. Kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung ini sebenarnya telah berlangsung cukup lama sebelum di tetapkannya Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015, Kegiatan simpan pinjam yang saat ini berlangsung telah dijalankan oleh Ekonomi Desa (UED). Adapun dalam kepengurusan pada BUMDes di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu berikut nama serta jabatan pengurus BUMDes Kembang Setanjung.

Tabel 1.1 : Nama- Nama Kepengurusan BUMDes Desa Tanjung Medan

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Suheri, SE	Direktur
2	Suryadi	KA. Unit SP
3	Tri Sundari, SS	Staf Keuangan
4	Nurainah	Staf Administrasi
5	Abdul Aris, ST	Staf Analisa Kredit
6	Arlan A. Fauzi, S.Pd	Dep kolektor

Sumber. *Profil BUMDes Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan, 2020*

Dari tabel I.1 di atas merupakan nama-nama yang menjadi kepengurusan BUMDes Kembang Setanjung di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Nomor : 02 /PerDes BAB III Pasal 07 Tentang Bidang Usaha, yaitu:

1. Jasa Keuangan meliputi Simpan-Pinjam
2. Angkutan darat airdan lainnya yang sejenis
3. Kelistrikan : Listrik Desa dan lain-lain yang sejenis, pelayanan pembayaran PLN;
4. Penyaluran 9 bahan pokok masarakat desa
5. Pergadanan hasil pertanian yang meliputi hasil hasil bumi, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan agro bisnis serta sarana dan prasarana pertanianperkebunan;
6. Industri kecil dan kerajinan rakyat

7. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi Desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat

Dari beberapa kegiatan diatas yang ditentukan dalam peraturan Desa pada realitanya berdasarkan pra observasi penulis bahwa jenis usaha yang baru terlaksana dalam 5 (tahun) ini adalah kegiatan simpan-pinjam dari 8 jenis usaha. Hal ini merupakan bentuk jenis usaha awal yang di lakukan oleh pihak BUMDes guna untuk mengenalkan kegiatan tersebut kepada masyarakat.

BUMDes Kembang Setanjung didirikan pada tanggal 28 april 2015, yang berkedudukan dan berkantor di Desa Tanjung Medan. Adapun maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa, selain itu tujuan pembentukannya juga untuk meningkatkan pendapatan asli desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung dimaksud untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa. Sementara itu, bidang usaha yang menjadi prioritas dari Badan Usaha Milik Kembang Setanjung adalah:

Adapun untuk modal dasar yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang setanjung sesuai dengan data yang penulis dapatkan dari kantor pemerintahan Desa Tanjung Medan yaitu berasal dari:

1. Bantuan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten,
2. Laba Usaha dari Bantuan Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.
3. Swadaya masyarakat
4. Laba Usaha dari Dana Swadaya Masyarakat
5. Bantuan dan kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Azas mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban dari BUMDes Kembang Setanjung dapat dilihat pada penyajian data di bawah ini:

1. Azas pengelolaan BUMDes
  - a. Pengelolaan kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan;
  - b. Warga masyarakat terlibat secara aktif
  - c. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan
2. Mekanisme pengelolaan BUMDes dilaksanakan dengan berpedoman pada azas pengelolaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan lebih lanjut di atur ADART BUMDes
3. Pertanggung jawaban
  - a. Direktur BUMDes melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes kepada kepala Desa

- b. Sistem pelaporan pertanggung jawaban, dibuat berdasarkan jenis usaha kegiatan
- c. Kepala desa melaporkan pertanggung jawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah Desa yang di hadiri oleh masyarakat.

Berikut ini adalah tabel pinjaman modal kerja masyarakat pada unit simpan pinjam di BUMDes Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel.1.2 Pinjaman modal kerja di BUMDes Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Jenis usaha	Orang	Rupiah	Ket
Perdagangan	56	Rp 723.480.000,-	-
Pertanian	0	Rp 0,-	-
Perkebunan	600	Rp 7.821.514.000,-	-
Perikanan	0	Rp 0,-	-
Peternakan	0	Rp 0,-	-
Industri Kecil	0	Rp 0,-	-
Jasa	9	Rp 205.000.000,-	-
Jumlah	665	Rp 8.749.994.000,-	-

Sumber : Kantor BUMDes Desa Tanjung Medan tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat data terkait peminjam yang telah diberikan oleh pihak BUMDes kepada masyarakat sebagai nasabah, masyarakat mendapatkan peminjaman dana usaha apabila memenuhi persyaratan berupa proposal usulan yang meliputi sebagai berikut:

1. Surat permohonan kredit
  - a. Fc KTP
  - b. Pas Photo 2x3
  - c. Kartu Keluarga
  - d. Fc. Anggaran
2. Mengisi formulir permohonan kredit
3. Pernyataan kesanggupan pembayaran hutang
4. Surat penyerahan anggunan
5. Surat penyerhan anggunan
6. Kwitansi
7. Surat perjanjian pemberian Kredit (SP2K)

Berdasarkan data yang telah penulis sajikan pada tabel 1.2, dapat dilihat jumlah nasabah yang melakukan peminjaman dan juga jumlah dana yang di pinjam pada masing-masing jenis pinjamanya, dan untuk mengetahui prihal permasalahan yang di hadapi oleh pengurus BUMDes Kembang Setanjung. Maka penulis akan menyajikan tabel di bawah ini yang memaparkan terkait dengan jumlah tunggakan yang ada di BUMDes Kembang Setanjung:

Tabel.3 Data pinjaman yang bermasalah pada BUMDes Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Permasalahan	Jumlah (Orang)	Keterangan (Total)
1.	Jumlah Pinjaman Lunas	255	Total, 666 Nasabah Laki-laki: 503 Orang Perempuan: 163 Orang
2	Pinjaman Belum Lunas	200	
3	Jumlah Penunggakan	211	
	Jumlah tunggakan		Rp 110.275,000,-

Sumber : Kantor Bumdes Kembang Setanjung 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah yang melakukan penunggakan itu adalah berjumlah sebanyak 202 orang nasabah dengan nilai tunggakan yang dihasilkan 110.275,000,- hal ini tentunya menjadi permasalahan yang nantinya dapat menghambat perkembangan dari BUMDes Kembang Setanjung itu sendiri.

Permasalahan yang ditemukan pada tabel diatas adalah terkait dengan penunggakan yang sering dilakukan oleh nasabah-nasabah BUMDes Kembang Setanjung. Dimana nasabah melakukan pembayaran tidak tepat dengan waktu yang telah ditentukan, dimana selisih waktu penunggakan (batas jatuh tempo) dengan proses pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat bisa mencapai satu hingga beberapa bulan setelah tempo.

Sementara itu, untuk jenis penunggakan yang menjadi permasalahan utama pada pelaksanaan operasional BUMDes Kembang Setanjung ini ini adalah

penunggakan yang nasabah tersebut tidak memberikan kabar atau keterangan terkait dengan alasan mereka tidak membayar kredit pinjaanya, dimana pada tabel disebutkan “ tunggakan jatuh tempo tanpa kabar “, nasabah yang memiliki permasalahan seperti inila yang menjadi penyebab terhambanya operasional dari Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung yaitu BUMDes Kembang Setanjung.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengemukakan beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Penulis melihat dari tujuh jenis usaha yang di tentukan dalam perdes, tetapi hanya terlaksana simpan-pinjam pada bidang perkebunan, hal ni dapat di lihat bahwa kegiatan BUMDes belum di lakukan secara maksimal.
2. Banyak nasabah BUMDes Kembang Setanjung yang melakukan Penunggakan Kredit, hal ini tentunya dapat mengganggu roda organisasi dari Badan Usaha Milik Desa tersebut. Dimana salah satu penyebab penunggakan yang terjadi di sebabkan karena usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak berkembang, sehingga modal pinjaman yang didapatkan tidak dapat menghasilkan dan menjadi modal mati yang tidak menguntungkan.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan diatas penulis terkait untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Didesa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengelolaan Bumdes Didesa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?

2. Apa saja faktor penghambat yang di hadapi dalam Pengelolaan Bumdes Didesa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

a. Untuk mengetahui Pengelolaan Bumdes Didesa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Raokan Hulu

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dari Pengelolaan Bumdes Didesa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Akademik yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data Sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

b. Teoritis yaitu penelitian yang diharapkan dapat memacu pengembangan ilmu pemerintah Khususnya Ilmu Administrasi, minimal dapt memperkaya inventaris hasil penelitian bidang Administrasi Publik.

- c. Praktis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Kepala Desa & Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi kepustakaan

1. Konsep administrasi

menurut . (Sondang.P. Siagian, 1973) Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut zulkifli (2005;16) konsep administrasi diidentikkan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis. Dalam studi administrasi dikonsepsikan menjadi dua, yaitu:

a. Administarsi dalam arti sempit

Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

b. Administrasi dalam arti luas

Pada konteks ini mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Henry fayol Pembagian Kerja (Division of Work) Pekerjaan harus dibagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil atau di-spesialisasi sehingga

Output (hasil kerja) Karyawan dan Efektifitas akan meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan dan keahlian pada tugas yang diembannya.

2. Keseimbangan Wewenang dan Tanggung Jawab (Authority dan Responsibility)

Para Manager memiliki wewenang dalam memerintahkan bawahan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Setiap Karyawan diberikan wewenang untuk melakukan suatu pekerjaan. Tetapi suatu hal yang perlu diingat, Wewenang tersebut berasal dari suatu Tanggung Jawab. Oleh karena itu, Wewenang dan Tanggung Jawab harus seimbang, makin besar wewenangnya makin besar pula pertanggungjawabannya.

3. Displin (Dicipline)

Disiplin harus ditegakkan dalam suatu organisasi, namun setiap organisasi memiliki cara yang berbeda-beda dalam menegakkan kedisiplinannya. Kedisiplinan merupakan dasar dari keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya.

4. Kesatuan Komando (Unity of Command)

Berdasarkan Prinsip Kesatuan Komando, Karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Jika terlalu banyak Atasan yang memberikan perintah, karyawan yang bersangkutan akan sulit untuk membedakan prioritasnya. Hal ini juga akan menimbulkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas yang diberikannya.

5. Kesatuan Arah (Unity of Direction)

Karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi harus memiliki tujuan dan arah yang sama dan bekerja berdasarkan rencana yang sama.

6. Mengutamakan Kepentingan Organisasi diatas kepentingan Individu (Subordination of Individual Interests to the General Interest)

Kepentingan Organisasi harus didahulukan dari Kepentingan Individu seorang karyawan. Termasuk kepentingan Individu Manager itu sendiri.

7. Kompensasi yang adil (Remuneration)

Salah satu faktor yang mempengaruhi Kepuasan kerja karyawan adalah Upah atau Gaji yang didasarkan pada tugas yang dibebankannya. Kompensasi yang dimaksud ini dapat berupa Finansial maupun non-finansial.

8. Sentralisasi (Centralization)

Menurut Fayol, seorang pemimpin atau Manajer harus mengadopsi prinsip Sentralisasi yang seimbang (bukan Sentralisasi penuh ataupun Desentralisasi penuh). Hal ini dikarenakan Sentralisasi penuh (Complete Centralization) akan mengurangi peranan bawahan dalam suatu organisasi, sedangkan desentralisasi akan menimbulkan kesimpangsiuran dalam pengambilan keputusan. Wewenang tertentu harus didelegasikan sebanding dengan Tanggung Jawab yang diberikan.

9. Rantai Skalar (Scalar Chain)

Rantai Skalar adalah garis wewenang dari atas sampai ke bawah. Setiap karyawan harus menyadari posisi mereka di dalam Hirarki Organisasi. Garis wewenang ini akan menunjukkan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

10. Tata Tertib (Order)

Tata Tertib memegang peranan yang penting dalam bekerja karena pada dasarnya semua orang tidak dapat bekerja dengan baik dalam kondisi yang kacau dan tegang. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja, fasilitas dan perlengkapan kerja harus disusun dengan rapi dan bersih.

11. Keadilan (Equity)

Manager harus bertindak secara adil terhadap semua karyawan. Peraturan dan Perjanjian yang telah ditetapkan harus ditegakkan secara adil sehingga Moral karyawan dapat terjaga dengan baik.

12. Stabilitas kondisi karyawan (stability of tenure of personnel)

Mempertahankan Karyawan yang produktif merupakan prioritas yang penting dalam Manajemen. Manager harus berusaha untuk mendorong dan menciptakan loyalitas Karyawan terhadap organisasi.

13. Inisiatif (Initiative)

Karyawan harus diberikan kebebasan untuk berinisiatif dalam membuat dan menjalankan perencanaan, tentunya harus dengan batas-batas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan.

14. Semangat Kesatuan (esprits de corps)

Dalam Prinsip “esprits de corps” ini, Manajemen harus selalu berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan semangat kesatuan Tim.

2. Konsep organisasi

Dalam pelaksanaan administrasi, sebuah organisasi merupakan salah satu tempat yang wajib dimiliki dan berperan penting, tanpa organisasi tidak akan mungkin sebuah rencana akan tercapai terutama di dalam pemerintahan yang bertujuan untuk tercapainya otonomi daerah.

Menurut Ancok (2012;21) organisasi sebagai tempat bagi sejumlah manusia untuk menjalankan aktivitas-aktivitas dalam pencapaian tujuan, individu maupun tujuan bersama dalam sebuah kelompok.

Menurut Torang (2013; 25) Organisasi adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksanaan tugas yang didisain untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta cara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan

dalam ikatan yang terdapat seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan (siagian, 2008;6).

Konsep organisai (organization) nampaknya merupakan titik sentra dari maksud dan tujuan diaplikasikanya setiap aspek studi administrasi. Bahwa keberadaan setiap aspek studi administrasi itu dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kebijakan manageria dan orrasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi organisasi.

Definisi konsep administrasi dalam arti luas ber titik tolak dari pendekatan multi aspek dan dimensi yang melekat dengan aktivitas organisasi itu. Pendekatan demikian melatar belakangi beragam redaksiomis definisi organisasi yang telah di tulis (dalam Zulkifli 2009;14), Merumuskan definisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah di tentukan ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang si sebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang di sebut bawahan.

Sebagai suatu proses organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenag, pengawasan, dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas. Definisi organisasi menurut Pendekatan proses antara lain tergambar dalam pendapat Massic (dalam Zulkifli 2009;14). Yaitu organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok orang yang

membagi tugas tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan hubungan kerja dan menyatukan aktivitas aktivitasnya kea rah pencapaian tujuan bersama.

Organisasi adalah kolektivitas khusus manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dunsire (dalam Kusdi 2011;14)

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan tempat atau wadah pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas bagi pencapaian tujuan (Syafri, 2012;12)

Menurut Dimock (dalam Kahmad, 2012;18) menyatakan organisasi adalah peraduan dari sistematis dari bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan. Koordinasi dan pengawasan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah di tentukan.

3. Konsep Manajemen

Apabila suatu organisasi tetap berjalan dengan baik dan sesuai tujuan, maka sudah tentu memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan dan menjalankan organisasi, adapun ilmu atau strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen.

Menurut Stoner manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi

dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (Zulkifli dan Yogia, 2014;17).

Menurut George R Terry (dalam Zulkifli, 2009;16) mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan- tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling dimana pada masing- masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Menurut Siagian (dalam Andry, 2015;12) manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan- kegiatan orang lain.

Menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli,2005;28) manajemen merupakan suatu sub konsep tetapi pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang- orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar- benar tercapai.

Kemudian menurut Hasibuan (2002;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari 6 unsur (6M) yaitu: Man, Money, Methode, Machines, Materials, dan Market.

Dengan demikian unsur manajemen yaitu 6M sangat penting terutama Man (manusia) dimana manusia sebagai unsur pertama sebagai pengatur dan pengelola

suatu kegiatan dan didukung oleh unsur- unsur lainnya sehingga kegiatan tersebut akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

4. Kebijakan

Kebijakan (policy) berbeda dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintah oleh berbagai pejabat daerah.

Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah peraturan pemerintah hanyalah berupa (reging) atau kombinasi antara peraturan dan pendapatan (beschicking).

Dalam melaksanakan tugas pelayanan public saat ini menunjukkan perkembangan paradig baru. Hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Perkembangan tersebut membawa pengaruh perubahan pada sikap dan perilaku pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan public. Pandangan inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Selain daripada itu menurut Syafiie (200;5 146) ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit, yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada pada bagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.

- b. Model kelompok, berlain dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan. Model kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.
- c. Model kelembagaan, yaitu model kelembagaan pemerintah
- d. Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasinya.
- e. Model rasialisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat dan meningkatkan hasil bersihnya.
- f. Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politik.

Menurut pendapat fiedrich (dalam Wibawa 2001 :12) kebijakan adalah arah tindakan yang usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.

Menurut boediarjo (2009:20) kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Menurut Heinz Evlau dan Kenneth Prewitt (dalam Agustino, 2008 : 6) adalah “keputusan tetap” yang didirikan oleh konstitusi dan pengulangan (reperetiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dari berbagai pendapat dapat diungkapkan bahwa kebijakan public dalam keputakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho, 2004:1-7)

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang

- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Proses dilakukan organisasi atau perorangan yang bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh legislative, eksekutif, yudikatif, administrasi Negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Menurut Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh (Abidin, 2002:21).

Abidin (2004:56) tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian criteria. Berikut ini criteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu diantara berbagai kebijakan :

- a. Efektifitas, mengukur suatu alternative sasaran yang dicapai dengan suatu alternative kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
- b. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- c. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.

Masih menurut Abidin (2004:23) kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada strategis sebab kebijakan public

berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

4. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah di lakukan dan akan di gunakan untuk meramalkan,memerhitungkan dan mengendalikan peaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik, Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau lebih tahu kepada yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penilaian positif dan negative atau juga gabungan dari keduanya.

Adapun menurut menurut Sondang P, Siagian (2005 : 174) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan di capai. Artinya melalui penilaian harus dapat di temukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses, output dan outcome (hasil), melalui evaluasi dapat diketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak (Nurcholis, 2005 : 67)

Evaluasi menurut Ndraha (2003:201) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standard dengan fakta dan analisis hasilnya.

- a. Model before-after yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (prilaku treatment) tolak ukuranya adalah before.
- b. Model das solen-das yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya
- c. Model kelompok control kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok control (Ndraha,2003,:202)

Evaluasi menurut Santoso (2004; 31) adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan berkaitan erat dengan perenvanaan yang secara utuh adalah salah satu fungsi dalam siklus manajemen apa yang direncanakan.

Definisi evaluasi yang dikemukakan oleh Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul “ Teori dan Proses Kebijakan Publik” yaitu:

Evaluasi dilakukan karena kebijakan publik gagal meraih maksud dan tujuan untuk melihat sebab- sebab kegagalan. Suatu evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang

diinginkan. Dalam bahasa yang lebih sempit, evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat suatu kebijakan” (Winarno,2002;165).

Menurut Nurcholis (2007;276) evaluasi adalah proses yang mendasarkan diri pada prinsip ketat dan tahapan waktu. Oleh karena itu, kita harus membuat skema umum penilaian dan membuat seperangkat instrument yang meliputi:

1. Input yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.
2. Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
3. Outputs (hasil), yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan.
4. Outcomes (dampak), yaitu apakah suatu pelaksana kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.

Menurut Wirawan. (2011;21) evaluasi proses dimulai ketika program mulai dilaksanakan. Faktor- faktor yang dinilai antara lain layanan dari program; pelaksanaan layanan, pemangku kepentingan (stakeholder) yang dilayani, sumber-sumber yang dipergunakan, pelaksanaan program dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana, dan kinerja pelaksanaan program.

Evaluasi proses merupakan evaluasi formatif yang berfungsi mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan program. Salah satu cakupannya adalah mengukur apakah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program jika terjadi penyimpangan dari yang direncanakan, diputuskan apa yang harus dilakukan untuk mengontrol ketimpangan dan mengembalikan pelaksanaan

program ke treknya dalam pengertian: kinerja yang diharapkan, penggunaan man, money, material, machine, dan method yang dipergunakan untuk melaksanakan program.

Menurut Wirawan (2011;22-24) tujuan dari evaluasi antara lain :

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.
4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.
5. Pengembangan staf program.
6. Memenuhi ketentuan undang- undang.
7. Akreditasi program.
8. Mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency.
9. Mengambil keputusan mengenai program.
10. Accountabilitas.
11. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program.
12. Memperkuat posisi politik.
13. Mengembangkan teori ilmu evaluasi dan riset evaluasi.

Menurut Wirawan. (2011;71) masukan input melukiskan sumber- sumber yang diperlukan oleh program. Sumber- sumber meliputi antara lain tenaga, keuangan, dan sumber- sumber masyarakat yang dapat dimanfaatkan program untuk merancang dan melaksanakan program. Aktivitas adalah proses, peralatan, kejadian- kejadian teknologi, dan tindakan yang merupakan bagian dari pelaksanaan program-program yang disebut juga sebagai intervensi atau perlakuan program. Intervensi ini dipakai untuk menimbulkan perubahan.

Keluaran (output) program merupakan produk langsung dari aktivitas program yang dapat berupa target jenis dan level layanan yang harus disajikan oleh program. Pengaruh (outcome) adalah perubahan khusus perilaku, pengetahuan, keterampilan, status, dan level berfungsinya para partisipan program yang mendapatkan layanan atau intervensi.

Kriteria Evaluasi Menurut Tangkilisan (2003;62) ada tiga macam yaitu sebagai berikut:

1. Efektifitas yang mengidentifikasi apakah pencapaian tujuan yang diinginkan telah optimal.
2. Efisiensi menyangkut apakah manfaat yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai dari program publik sebagai fasilitas yang dapat memadai secara efektif.
3. Responsivitas yang menyangkut, mengkaji apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau keinginan, preferensi atau nilai kelompok tertentu terhadap pemanfaatan suatu sumber daya.

Menurut Bridgman dan Davis (dalam Suharto,2007;3) pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu: (1)indicator input, (2) indicator process, (3) indicator output, dan (4) indicator outcomes. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan

kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.

- b. Indikator process memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. indikator ini meliputi aspek efektifitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
- c. Indikator output (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari system atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
- d. Indikator outcomes (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Menurut Wirawan (2011;71) masukan (input) melukiskan sumber- sumber yang diperlukan oleh program. Sumber- sumber meliputi antara lain tenaga, keuangan, dan sumber- sumber masyarakat yang dapat dimanfaatkan program untuk merancang dan melaksanakan program. Aktivitas adalah proses, peralatan, kejadian- kejadian, teknologi, dan tindakan yang merupakan bagian dari pelaksanaan program- program yang disebut juga sebagai intervensi atau perlakuan program. Intervensi ini dipakai untuk menimbulkan perubahan. Keluaran (output) program merupakan produk langsung dari aktivitas program yang dapat berupa target jenis dan level layanan yang harus disajikan oleh program. Pengaruh (outcomes) adalah perubahan khusus perilaku, pengetahuan,

keterampilan, status, dan level berfungsinya para partisipan program yang mendapatkan layanan atau intervensi.

Menurut Dunn (2003:608) Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

5. Konsep Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut Muryani (dalam ilham 2008) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang, dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan hasil seperti laba atau keuntungan.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang di pisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa, yaitu:

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat
2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa yang terbebas dari pengaruh pelepasan uang rentenir
4. Meningkatkan sumber daya pendapatan Asli Desa (PADes) dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
5. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
6. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan suatu kesatuan ekonomi masyarakat desa

Dari fungsi badan usaha milik desa tersebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipandang cukup penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat di desa, maka tentu saja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tuntut agar lebih profesional demi meningkatkan sumber penghasilan masyarakat desa. Dalam hal ini terdapat beberapa alasan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

- a. Alasan ekonomi, yaitu sebagai langkah mengoptimalkan ekonomi didesa upaya dan menggali serta mengembangkan sumber daya desa, memberikan pelayanan masyarakat dan mencari keuntungan,
  - b. Alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha melayani kepentingan publik, baik investasi yang sangat besardan luas,
  - c. Alasan budget, yaitu sebagai upaya pemerintah desa dalam mencari pendapatan diluar pajak, restribusi dan dana pertimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelsksanaan pemerintah desa,
  - d. Alasan politik, yaitu mempertahankan potensi ekonomi yang mempunyai daya dukung politik bagi pemerintah desa, yang mana alasan politisiny abiasnya jarang dikemukakan,lebih lagi secara formal.
6. Tugas dan Fungsi

Menurut Ndraha (20003;75) fungsi pemerintah adalah jenis tindakan atau aktivits yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu:

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan. Merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang yang melanggarnya.

b. Fungsi pemberdayaan dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendir, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.

c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selain itu menurut Ndraha (dalam Labobo, 2006:25) pemerintah memiliki fungsi dasar yaitu:

1. Fungsi primer (pelayanan)

Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasi termasuk juga hakam, layanan civi dan layanan birokrasi.

2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)

Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (powerless) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pelayanan.

Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah.

B. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau teori yang di susun dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang disesuaikan dengan konsep penelitian yang sedang diteliti. Evluasi Pengelolaan BUMDes didesa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dengan tepri-teori yang sudah dijelaskan pada pembahasan di atas, hal tersebut akan menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian ini, adapun kerangka pikirnya adalah sebagai berikut.

Gambar II.1: Kerangka Pikir Evaluasi Pengelolaan BUMDes Didesa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Sumber : olahan penulis 2020

C. Konsep Operasional

Untuk dapat memberikan penjelasan mengenai konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini, berikut diuraikan mengenai konsep operasional :

1. Administrasi menurut Sondang Siagian (2014:4) administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih.
2. Organisasi Menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2009;71) adalah sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal ketika dalam rangka pencapaian suatu tujuan
  1. Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
  2. Evaluasi adalah proses perbandingan antara standard dengan fakta dan analisis hasilnya (Ndraha, 2003;202).
  3. BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintahan desa yang dikelola secara profesional dengan seluruh atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
  4. Indikator Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Bupati No.64 Tahun 2014
    - a) Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa.

Dengan adanya pemberdayaan yang diciptakan oleh lembaga tersebut (BUMDes) tentunya akan mendorong perekonomian masyarakat apabila dijalankan dengan sesuai dan tepat sasaran

b) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif

Menetapkan kelembagaan desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan peluang usaha masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah kebawah

c) Mendorong berkembangnya usaha mikro Meningkatkan sumber pendapatan Asli desa (PADes)

Usaha mikro memegang peranan sangat penting dalam di Indonesia terutama dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, penopang kegiatan ekonomi local.

d) Sebagai sumber dana yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat secara

Salah satu instrument yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat

e) Meningkatkan kesempatan berusaha

Menetapkan kelembagaan desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat di harapkan dapat membentuk atau meningkatkan kesempatan berusaha kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah

f) Membantu Pemerintah Desa dalam Menaggulangi Kemiskinan

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dan memberikan lapangan pekerjaan atau usaha diharapkan dapat mendorong penanggulangan kemiskinan

g) Membuka lapangan Kerja

Selain lapangan usaha yang berkembang, maka lapangan pekerjaan akan terbuka untuk masyarakat

D. Operasiona Variabel

Tabel II.1 : Operasionalisasi penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Didesa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hul

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya(Ndraha 2003;202)	Evaluasi Pengelolaan Badan usaha Milik Desa	1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa	a.Merealisasikan kegiatan BUMDes secara terang-terangan b. Mengutamakan masyarakat dengan perekonomian tingkat bawah	Baik Cukup baik Kurang baik
		2.Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif	a. Memberikan Pelatihan untuk Menciptakan produk-produk Asli Daerah yang memiliki nilai jual b. Pengembangan program untuk meningkatkan usaha masyarakat	Baik Cukup baik Kurang baik

		3. mendorong berkembangnya usaha mikro	a. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa b. Meningkatkan usaha sector informal	Baik Cukup baik Kurang baik
		4. Sebagai sumber dana yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat	a. Memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya b. memberikan kebutuhan sosial kepada masyarakat	Baik Cukup baik Kurang baik
		5. Meningkatkan kesempatan berusaha	a. Memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada masyarakat agar dapat mengelola usaha. b. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang sudah melakukan peminjaman	Baik Cukup baik Kurang baik
		6. Membantu pemerintah Desa dalam menanggulangi kemiskinan	a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap keberadaan BUMDes b. Memberi	Baik Cukup baik Kurang baik

			pelatihan kepada tim pembimbing	
		7.Membuka lapangan kerja	a. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat b. Menyediakan barang dan jasa	Baik Cukup baik Kurang baik

Sumber : *Olahan Penulis 2020*

E. Teknik Pengukuran

Sebagai pertimbangan dalam menganalisa data yang terkumpul, maka penulis menggunakan pengukuran masing-masing konsep, yaitu pengukuran terhadap setiap indikator variabel penelitian ini menggunakan skala likert. Skala liker digunakan untuk mengembangkan instrumen yang digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat seseorang atau sekelompok orang terhadap potensi dan permasalahan suatu objek, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, dan hasil tindakan (Sugiyono, 2015;199)

Pengukuran terhadap indikator variabel diklarifikasikan menjadi 3 bagian kategori penelitian yaitu Baik, Cukup Baik, Kurang Baik Untuk setiap item pertanyaan yang diajukan per indikator variabel, masing-masing alternatif jawabannya terdiri dari 3 kategori dengan nilai skor sebagai berikut.

Tabel II.2 : Pengukuran Skala Likert

Kategori Penilaian	Bobot
Baik (B)	3
Cukup Baik (CB)	2
Kurang Baik (KB)	1

Sumber : Skala Likert

Untuk mengetahui skor kategori penilaian variabel digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Skor Tertinggi} &= \text{Interval tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Responden} \\ &= 3 \times 14 \times 86 = 3.612 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor Terendah} &= \text{Interval terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} \times \text{Responden} \\ &= 1 \times 14 \times 86 = 1.204 \end{aligned}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori Skor}}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{3.612 - 1.204}{3} = 802$$

Sehingga diperoleh kategori penilaian skor pada tabel di bawah :

Interval Skor	Kategori
2.810 - 3.612	Baik
2007 - 2.809	Cukup Baik
1.204 - 2006	Kurang Baik

Untuk mengetahui kesimpulan per indikator diperlukan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Skor Tertinggi} &= \text{Interval tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Responden} \\ &= 3 \times 2 \times 86 = 516 \end{aligned}$$

$$\text{Skor Terendah} = \text{Interval terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} \times \text{Responden}$$

$$= 1 \times 2 \times 86 = 172$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori Skor}}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{516 - 172}{3} = 114$$

Sehingga diperoleh kategori penilaian skor pada tabel di bawah :

Interval Skor	Kategori
402 - 516	Baik
287 - 401	Cukup Baik
172 - 286	Kurang Baik

F. Uji Validasi

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015; 12)

1. Teknik Analisis Data

Analisis data metode Kuantitatif yaitu metode yang menunjukkan kepada riset dalam bentuk rumus-rumus. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Maka penulis menggunakan analisis yang hanya melibatkan dua variabel (X) dan (Y) yaitu:

A. Uji validasi dan Reliabilitas Instrumen

a. Uji validitas

Uji validasi merupakan alat ukur untuk melihat hasil pengukurannya dapat konsisten serta untuk mengetahui kevalidatan kusioner yang disebarakan. Peneliti menyebarkan kusioner kepada 86 responden yang merupakan nasabah BUMDes Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Dengan acuan dikatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel dan diketahui R tabel 0,2120 yaitu dari nilai R tabel $\alpha =$ dengan derajat df $n-2=84$

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe survey deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji, penelitian dekskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang bagaimana Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif karena proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument yang terstruktur, kuisisioner, data berbentuk numerik, hasil analisis didasarkan pada sampel yang merupakan representasi dari populasi dan penelitian kuantitatif mengutamakan objektivitas data dalam mengkaji suatu fenomena sosial.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Alasan penulis melakukan penelitian di Desa tersebut dikarenakan penulis Tertarik bahwasanya Di Desa Tanjung Medan

memiliki usaha yang merupakan Badan Usaha Milik Desa dimana usaha tersebut memiliki usaha yang merupakan Badan Usaha Milik Desa dimana usaha tersebut memiliki asset yang dapat membantu perekonomian masyarakat kurang mampu yang ada di desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tetapi pada fenomenanya dilapangan, penulis

menduga bahwa ada beberapa permasalahan yang menjadi penyebab tidak maksimalnya fungsi BUMDes tersebut. Demikian maka penulis tertarik mengangkat judul tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono,2012;90). Sedangkan menurut Mukhtar, (2013;93) Populasi adalah keseluruhan orang yang menjadi sasaran penelitian. Dari keseluruhan populasi yang luas, maka di batasi dari sebagai ari poulsi tersebut yang dikenal populasi target.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2018;131) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Didalam menentukan sampel diperlukan sebuah metode pengambilan sampel yang tepat agar diperoleh sampel yang

representatif (mewakili). Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Tanjung Medan sebagai komisari (penasehat) BUMDes Kembang Setanjung Bapak Sujiono, Pengawas BUMDes Kembang Setanjung Bapak Hari Wahyudi, Direktur BUMDes Kembang Setanjung Bapak Ahmad Suheri, SE. Nasabah BUMDes Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan, untuk lebih detailnya masalah populasi dan sampel ini, dapat di lihat pada table di bawah :

Table III.1: Jumlah Populasi dan Sampel Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

NO	Unit Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase (%)
1	Kepala Desa Tanjung Medan	1	1	100%
2	Sekretaris Desa Tanjung Medan	1	1	100%
3	Direktur BUMDes Kembang Setanjung	1	1	100%
4	Staf Administrasi BUMDes	1	1	100%
5	Staf Analisis Kredit BUMDes	1	1	100%
6	Nasabah peminjam Dana Bumdes Desa Tanjung Medan	665	86	13%
	Jumlah	670	91	

Sumber : *hasil modifikasi tahun 2020*

Jumlah populasi untuk Nasabah BUMDes Kembang setanjung yang didapatkan dalam penelitian ini adalah 665 orang, penelitian ini menggunakan metode slovin dengan rumus:

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

= Jumlah sampe

N = Jumlah populasi

E = Batas toleransi Kesalahan (0,102)

$$n = 665 / (1 + 665 \times 0,102^2)$$

$$n = 665 / 7,65n = 86$$

Penelitian yang membahas tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Memiliki Sampel yaitu Kepala Desa yang berjumlah 1 orang Sekretaris Desa berjumlah 1 orang dengan persentase 100% Direktur BUMDes sebanyak 1 orang dengan dengan persentase 100% Staf Analisis Kredit berjumlah 1 Orang dengan Persentase 100%

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu.

- a. Untuk BUMDes Kembang Setanjung digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota BUMDes
- b. Untuk masyarakat digunakan teknik Purposive sampling, pemilihan sampel berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas untuk dijadikan sampel.

E. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah melalui beberapa sumber data yaitu

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis, Data yang diperoleh seperti:

- a. Identitas responden
- b. Hasil Wawancara Dengan Responden,
- c. Tanggapan responden tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung Di Desa Tanjung Medan

Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan:

- a. Sejarah singkat Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian
- c. Struktur Organisasi BUMDes Kembang Setanjung

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap Evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indra atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan, observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner, kalau wawancara dan kuisisioner selalu berkomunikasi dengan

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

C. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.

D. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan data dan menghimpun dan menganalisa dokumen- dokumen. Baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dengan metode Kuantitatif secara deskriptif, yaitu suatu analisa yang memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan dengan table dan uraian kemuiian dianalisa selanjutya diambi kesimpulan.

Menurut patton (dalam Moleong,2005;280) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ini dapat dibedakan dengan

penafsiran yaitu membedakan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.3: Jadwal Penelitian Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																							
		Oktober				November				Desember				Januarir				Febuari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Seminar UP					■																			
3	Revisi UP						■																		
4	Revisi Kuisisioner							■																	
5	Rekomendasi Survey									■	■	■	■												
6	Survey Lapangan												■												
7	Analisis Data													■	■	■	■								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																	■	■	■	■				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				■				

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah singkat Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, yang dijuluki Negeri Seribu Suluk, Ibukotanya berada di di Pasir Pengaraian. letaknya sekitar 187 km dari Ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru. Kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari rumpun minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu Daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu (Rantau nan Tigo Jurai).

Pada masa itu diistilahkan sebagai „Taratak Air Hitam“ yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar Kampar dan Kuantan sekarang. Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuu hilir dari sungai-sungai besar mengalir ke Pesisir Timur. Diantaranya adalah Sungai Rokan, Siak, Tapung, Kampar dan Indragiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk di dalam Provinsi Riau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahasa daerah yang termasuk varian Rumpun Budaya Minangkabau. Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Di sekitar perbatasan Timur dan Tenggara, bermukim pula sedikit suku melayu yang memiliki adat istiadat dan bahasa daerah mirip dengan tetangga di Rokan Hulu dan bengkalis. Namun di sekitar Rokan Hulu Sebelah Utara dan

Barat Daya, ditemukan penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Mereka telah mengalami proses melayunisasi sejak berabad yang lampau, dan tidak banyak meninggalkan jejak sejarah untuk ditelusuri. Mereka umumnya mengaku sebagai orang melayu. Selain itu juga banyak penduduk bersuku Jawa yang datang lewat program transmigrasi nasional sejak masa kemerdekaan maupun keturunan para perambah hutan asal Jawa masuk pada masa penjajahan lewat Sumatera Timur. Mereka tersebar di seluruh Wilayah Rokan Hulu, terutama di sentra-sentra lokasi transmigrasi dan juga di areal perkebunan sebagai tenaga buruh. juga banyak bermukim para pendatang asal Sumatera utara bersuku batak yang umumnya bekerja disektor jasa informal dan perkebunan.

Tahun 1987 dibentuklah pembantu Bupati Kampar Wilayah 1 yang wilayahnya sama dengan wilayah Kewedanaan Pasir pengaraian yang membawahi enam kecamatan yaitu Kecamatan Tambusai, Rambah, Kepenuhan, Kunto Darussalam, Rokan IV Koto dan Tandun, dan pada akhirnya pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya UU No. 53 tahun 1999 yang dalam perjalannya terjadi perubahan dalam pembentukannya Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan sesuai dengan UU No. 11 tahun 2003. sejak ditetapkannya menjadi Kabupaten secara defenitif, Rokan Hulu telah banyak mengalami kemajuan baik pembangunan maupun administrasi pemerintahan. Jumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu terdiri enam belas Kecamatan yaitu : 1. Bangun Purba 2. Kabun 3. Kepenuhan 4. Kunto Darussalam 5. Rambah 6.

Rambah Hilir 7. Rambah Samo 8. Rokan IV Koto 9. Tambusai 10. Tambusai Utara 11. Tandun 12. Ujungbatu 13. Pagaran Tapah Darussalam 14. Bonai Darussalam 15. Kepenuhan Hulu 16. Pendalian IV Koto

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu yaitu: Visi “ Bertekad mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya” Misi “ Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

1. Mengurangi kemiskinan
2. Terciptanya lapangan kerja
3. Terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan
4. Terwujudnya pemerataan pembangunan di segala sektor
5. Terbukanya berbagai isolasi terutama di pedesaan
6. Meningkatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan di segala sektor pembangunan
8. Berbagai fasilitas pelayanan dapat bekerja maksimal
9. Semua sektor infrastruktur terbangun maksimal mulai dari jalan, jembatan pendidikan dan lain-lain.

B. Profil Desa Tanjung Medan

Desa Tanjung Medan merupakan salah satu desa diantara 12 desa yang berada di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Adapun batas-batas dari Desa Tanjung Medan adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan sawit PT. Torganda

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tambusai Utara (R.Kasai)
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tambusai Utara (R. Kasai)
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mahato

Apabila dilihat dari letak wilayah Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, maka wilayah Desa Tanjung Medan ini mempunyai jarak :

1. Jarak dengan Ibu Kota Provinsi + 122 Km
2. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten + 85 Km
3. Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan + 8 Km

Adapun luas Desa Tanjung Medan adalah 3000 Hektar, sebagian besar terdiri dari perkebunan kelapa sawit, Perkebunan pohon karet, perumahan masyarakat, fasilitas umum desa dan sebagian kecil daerah rawa.

Penduduk yang berdomisili di Desa Tanjung Medan pada umumnya adalah orang suku Jawa dan suku Melayu. Namun beberapa tahun terakhir sudah ada beberapa pendatang yang berasal dari Sumatra Utara. Berdasarkan perhitungan penduduk sampai akhir tahun 2013 jumlah penduduk Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 4636 jiwa yang terdiri dari 964 KK. Dengan rincian laki-laki sebanyak 2434 jiwa dan perempuan sebanyak 2242 jiwa.

C. Profil Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung

Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung didirikan pada tanggal 28 april 2015, Dimana kantor BUMDes ini berada di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Pembentukan Badan Usaha

Milik Desa Kembang Setanjung dimaksudkan untuk memberikan kewenangan desa, maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa.

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.

Dalam menjalankan roda organisasinya, Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung adalah

- a. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten,
- b. Laba Usaha dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten
- c. Swadaya masyarakat
- d. Laba Usaha dari Dan Swadaya Masyarakat
- e. Bantuan dan kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak meningkat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Keberhasilan sebuah penelitian sangat bergantung pada sampel yang menjadi sumber data yang ada di lapangan, karena di dalam proses penelitian ini harus mengetahui jumlah, jenis atau golongan sampel ataupun dapat dikatakan dengan identitas sampel. Terkait permasalahan dalam penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, jadi data-data yang didapat dalam penelitian ini bersumber pihak yang berwenang dalam menjalankan BUMDes, yaitu Kepala Desa Tanjung Medan (Komisaris/Penasehat), ketua BPD, dan Direktur BUMDes dengan cara melakukan wawancara, dan juga menyebarkan kusioner pada Nasabah BUMDes berjumlah 86 sampel.

Sehubungan dengan penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Miik Desa (BUDes) Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Identitas responden ini diperlukan untuk mempermudah penulis dalam mengelolah data yang di sajikan dalam bentuk tabel. Selain itu penulis menilai bahwa pentingnya penulis untuk mengetahui usia dan pendidikan responden, karena hal ini akan dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap penelitian penulis. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang identitas responden (BUMDes) Di Desa Tanjung Medan Kecmatan Tambusai

Utara Kabupaten Rokan Hulu, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia berdasarkan tabel berikut ini;

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, serta dengan cara penyebaran kuesioner maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan jenis kelamin berikut ini:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin

NO	Klasifikasi Responden	Jumlah	Peresentase%
1	Laki-laki	56	65%
2	Perempuan	30	35%
	Jumlah	86	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2021

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa Nasabah yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Miik Desa (BUMDes) Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 50 orang dengan presentase58% sedangkan pada nasabah yang memiliki jenis kelamin perempuan dengan jumlah 36 orang dengan presentase42% dan total keseluruhan jumlah responden nasabah 86 orang.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Identitas ke dua yang penulis peroleh dari lapangan adalah berdasarkan latar belakang usia. Usia merupakan salah satu penentu dalam pelaksanaan penelitian ini, karena semakin matang usia seseorang maka cara berfikirnya pun tentunya sudah berbeda dengan seseorang yang belum memiliki cukup umur, dari hasil penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang Setanjung Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Nasabah BUMDes

NO	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	0	0%
2	31-40 Tahun	30	35%
3	41-50 Tahun	54	62%
4	>50 Tahun	2	3%
	Jumlah	86	100%

Sumber: Data olahan Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel V.2 di atas dinyatakan bahwa responden dari Nasabah BUMDes, responden yang paling banyak, usia 41-50 Tahun sebanyak 54 orang dengan persentase (62%) dan usia pada 31-40 Tahun yang berjumlah 30 orang dengan persentase (35%), sedangkan usia paling minim adalah >50 Tahun berjumlah 2

orang dengan peresentase(7%). Hal ini dikarenakan umur pada interval 41-50 Tahun adalah responden yang memiliki usaha dan mengembangkannya dengan cara meminjam ke BUMDes.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dan identitas yang ketiga yang penulis dapatkan dari lapangan berdasarkan latar belakang pendidikannya, rata-rata responden memiliki pendidikan SMA, Pendidikan sangat mempengaruhi cara sudut pandang seseorang, baik itu dalam memberikan pendapat maupun dalam melakukan suatu tindakan. Dari penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Uara Kabupaten Rokan Hulu dengan cara penyebaran kusioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang jenjang Pendidikan berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan Nasabah BUMdes

NO	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase
1	SD	6	7%
2	SLTP	26	30%
3	SLTA	46	53%
4	Diploma	3	4%
5	SarjanaS1/S2	5	6%
	Jumlah	86	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian , 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Nasabah BUMDes yang dijadikan sampel dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dominannya adalah pendidikan SMA yaitu berjumlah 55 orang dengan persentase (64%), responden yang memiliki Pendidikan SMP berjumlah 15 orang dengan presentase (17%), sedangkan responden yang paling minm memiliki pendidikan SD yaitu 0 (0%).

Hal ini dikarenakan bahwa pada di lapangan dapat penulis penulis menjumpai nasabah yang dijadikan responden dengan pendidikan terakhir SMA, dan merek memiliki usaha berkebun, berdagang dan sebagainya.

4. Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Jenis pekerjaan responden penelitian Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilihat pada tabel V.4 berikut ini:

Tabel V.4 Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)	Peresentase (%)
1	Petani/Pekebun	45	52%
2	Pedagang/Wiraswasta	30	34%
3	Bengkel	2	3%
4	Guru	3	4%
5	Peternakan	6	7%
	Jumlah	86	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian , 2021

Dari Tabel V.4 diatas tingkat Jenis pekerjaan responden begitu beragam dimulai dari petani/pekebun sebanyak 50 dengan presentase 58%, responden penelitian dari jenis pekerjaan Pedagang/Wiraswasta sebanyak 25 dengan presentase 28% , responden penelitian dari jenis pekerjaan Bengkel sebanyak 2 orang dengan presentase 3%, responden penelitian dari jenis pekerjaan guru sebanyak 6 orang dengan presentase 4%, responden penelitian dengan jenis pekerjaan di bidang Peternakan sebanyak 6 orang dengan presentase 7%.

A. Hasil Dan Pembahasan Dari Indikator Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Pada penelitian terkait Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ini dapat diukur dengan beberapa berdasarkan Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2014 dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini yang pertama adalah:

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Desa
2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro Meningkatkan sumber pendapatan Asli Desa (PADes)
4. Sebagai sumber dana yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat
5. Meningkatkan kesempatan berusaha
6. Membantu Pemerintah Desa dalam Menaggulangi Kemiskinan
7. Membuka lapangan Kerja

Dalam penelitian Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ini dilakukan pembahasan satu persatu dari setiap penilaian, agar data yang dihasilkan dapat secara mudah dan dipahami

1. Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat Desa

Adapun salah satu tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kemaslahatan masyarakat desa, salah satunya agar masyarakat dapat membentuk unit usaha baru sehingga dapat meningkatkan produktifitas usaha bagi masyarakat tersebut.

Hasil tanggapan responden tentang indikator penetapan standar dalam Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Miik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupten Rokan Hulu.

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat Desa

No	Sub Indikator	Tanggapan Responden			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Merealisasikan kegiatan BUMDes	25	46	15	86
2	Mengutamakan masyarakat yang membutuhkan	10	35	41	86
Jumlah		35	81	56	172
Skor		105	162	56	323
Kategori		Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel V.5 dengan responden berjumlah 86 orang, dengan item pertanyaan mengenai Merealisasikan kegiatan diperoleh 25 orang memberikan

jawaban Baik, 46 orang memberikan jawaban Cukup Baik dan 15 orang memberikan jawaban Kurang Baik. Kemudian selanjutnya untuk item pertanyaan yang kedua yaitu tentang mengutamakan masyarakat dengan perekonomian tingkat bawah penulis memperoleh data bahwa sebanyak 10 orang memberikan jawaban Baik, 35 orang memberi jawaban Cukup Baik dan untuk 41 orang lainnya memberikan jawaban kurang baik. Dengan demikian dari data tersebut diperoleh skor dengan angka 323.

Untuk mengetahui kesimpulan diperlukan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Skor Tertinggi} &= \text{Interval tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Responden} \\ &= 3 \times 2 \times 86 = 516 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor Terendah} &= \text{Interval terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} \times \text{Responden} \\ &= 1 \times 2 \times 86 = 172 \end{aligned}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori Skor}}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{516 - 172}{3} = 114$$

Sehingga diperoleh kategori penilaian skor pada tabel di bawah :

Interval Skor	Kategori
402 – 516	Baik
287 – 401	Cukup Baik
172 – 286	Kurang Baik

Dengan berpedoman pada tabel di atas dapat penulis katakan bahwa tanggapan responden terhadap indikator mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa berada dalam kategori penilaian “**Cukup Baik**”

Dengan skor angka 323.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, maka penulis akan memberikan penyajian hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap masing-masing informan penulis yang bersal dari perwakilan dari pihak-pihak yang berweang seperti Kepala Desa Tanjung Medan Sebagai Penasehat BUMDes Kembang Setanjung yaitu Bapak Sujiono, selanjutnya Direktur BUMDes Kembang Setanjung yaitu Bapak Ahmad Suheri, SE. Dalam penyajian wawancara ini, penulis memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masing-masing pembahasan pada indikator di atas, untuk tanggapan pertama Kepala Desa Tanjung Medan sebagai penasehat BUMDes Kembang Setanjung memberikan jawaban sebagai berikut:

“Sudah dilaksanakan, dan masyarakat juga sudah mengetahuinya, saya pastikanSeluruh masyarakat Desa sudah mengetahui keberadaan BUMDes dan juga program-program nya, dan hampir semua Kepala Keluarga sudah pernah meminjam di BUMDes Kembang Setanjung, dan pastinya program ini sangat membantu perekonomian masyarakat (wawancara 03 agustus 2021, Bapak Hari Wahyudi, sebagai Pengawas BUMDes Kembang Setanjung)”

Wawancara yang telah penulis lakukan dengan direktur BUMDes Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dimana dalam hal ini adalah Bapak Ahmad Suheri,SE dan keterangan yang diberikan oleh beliau terkait dengan pertanyaan penulis yang berkaitan dengan indikator pertama :

“Program ini sudah kita lakukan sosialisasi dari pertama kali di luncurkan Di Desa Tanjung Medan, dan itu melibatkan aparat-aparat

terkait, baik dari Kabupaten dan juga Kecamatan, Sehingga pihak Kepolisian hadir dalam peluncuran progra tersebut, dan masyarakat sangat antusias akan program ini” (Wawancara. Bapak Ahmad Suheri SE. Direktur BUMDes Kembang Setanjung)”

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang sudah merealisasikan kegiatan BUMDes secara terang-terangan, dan masyarakat yang penulis temui sudah mengetahui terkait dengan program BUMDes tersebut. Tetapi yang menjadi permasalahan dilapangan adalah program tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat

2. Meningkatkan Kreatifitas Dan Peluang Usaha Ekonomi Produktif

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan sebuah langkah untuk mendorong peningkatan aktivitas serta kreatifitas di daerah yang miskin atau angka kesejahteraannya menengah ke bawah.

Secara umum ekonomi kreatif dapat dipahami sebagai suatu sistem kegiatan manusia yang berkaitan dengan kegiatan kreasi produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa yang bernilai kultural, artistik, estetika, intelektual, dan emosional bagi para pelanggan di pasar. Pada dasarnya ekonomi kreatif ini adalah memanfaatkan kreatifitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja yang menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Meningkatkan Kreatifitas dan Peluang Usaha Ekonomi Produktif

No	Sub Indikator	Tanggapan Responden	Total

		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberikan Pelatihan	21	50	15	86
2	Meningkatkan Program	30	40	16	86
Jumlah		51	90	31	172
Skor		153	180	31	364
Kategori		Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel V.6 diatas dengan jumlah responden 86 orang dengan 2 item pertanyaan yang di ajukan oleh penulis yaitu mengenai kegiatan memberikan pelatihan untuk menciptakan produk-produk asli daerah yang memiliki nilai jual. Penulis memperoleh data, 21 orang memberikan jawaban Baik, 50 orang memberikan jawaban Cukup Baik dan 15 orang lainnya memberikan jawaban Kurang baik.

Kemudian untuk pertanyaan yang kedua mengenai pengembangan program untuk peningkatan usaha masyarakat berdasarkan kuisisioner yang telah di sebar oleh penulis sebanyak 30 orang meberikan jawaban pada kategori Baik, 40 orang dengan jawaban Cukup Baik serta 16 orang lainnya memberikan jawaban Kurang Baik. Berdasarkan data tersebut penulis memperoleh skor dengan angka 364.

Untuk mengetahui kesimpulan diperlukan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Skor Tertinggi} &= \text{Interval tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Responden} \\ &= 3 \times 2 \times 86 = 516 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor Terendah} &= \text{Interval terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} \times \text{Responden} \\ &= 1 \times 2 \times 86 = 172 \end{aligned}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori Skor}}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{516-172}{3} = 114$$

Sehingga diperoleh kategori penilaian skor pada tabel di bawah :

Interval Skor	Kategori
402 - 516	Baik
287 - 401	Cukup Baik
172 - 286	Kurang Baik

Dengan demikian berdasarkan acuan tabel kategori penilaian di atas pada indikator meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif diperoleh skor 364 yang artinya berada dalam kategori Cukup Baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sujiono selaku Kepala Desa Tanjung Medan dan Sebagai Penasehat BUMDes dan Bapak Ahmad Suher, SE diperoleh informasi sebagai berikut:

“Peningkatan pendapatan masyarakat sudah sangat baik hal ini dapat dilihat dari perkembangan Badan Usaha Milik Desa yang sudah menyumbangkan PADes dan sudah digunakan dengan baik oleh pemerintah desa, namun masih ada kekurangan karena BUMDes Kembang Setanjung masih menjalankan satu program yang dijalankan yaitu simpan pinjam (wawancara 03 agustus 2021 Bapak Sujiono selaku Kepala Desa Tanjung Medan dan selaku Penasehat BUMDes Kembang Setanjung)”

Selain itu pada wawancara tersebut beliau juga menuturkan adanya kendala dalam pelaksanaan simpan pinjam tersebut, berikut penuturan direktur BUMDes

Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu oleh Bapak Ahmad Suheri,SE ;

“Praktek nya memang belum berjalan untuk proses memberi pembinaan dan pelatihan dikarenakan fasilitas dan juga SDM yang terbatas, disisi lainnya, masyarakat yang meminjam juga tidak semuanya mengalokasikan dana nya untuk modal usaha, contohnya saja mereka meminjam dana dengan isi proposal untuk mmbuka warung, tetapi faktanya dilapangan mereka, menggunakan uang tersebut untuk membeli motor dan kebutuhan lainnya, jadi kendalanya ada dihal-hal Seperti ini” (wawancara Bapak Ahmad Suheri, SE Selaku direktur BUMDes Kembang setanjung)

Kemudian berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bumdes Kembang Setanjung sudah meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi Bumdes Kembang setanjung belum memberi praktek dan pelatihan dikarenakan terkendala fasilitas serta masih kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat desa tentang bagaimana mengalokasikan dana pinjaman agar usaha yang di bangun dan di rintis dapat berjalan dan meberikan keuntungan bagi masyarakat dan pendapatan desa tersebut.

3. Mendorong Berkembangan Usaha Mikro

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM juga bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun

perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. yang harus memperoleh kesempatan , dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM).

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Mendorong berkembangnya Usaha Mikro

No	Sub Indikator	Tanggapan Responden			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kemudahan memperoleh barang dan jasa	30	45	11	86
2	Meningkatkan usaha sector informal	25	55	6	86
Jumlah		55	100	17	172
Skor		165	200	17	382
Kategori		Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel V.7 di atas dengan acuan hasil kuisisioner 2 item pertanyaan kepada 86 orang sampel mengenai memberikan kemudahan kepada masyarakat memperoleh barang dan jasa penulis memperoleh data bahwa sebanyak 30 orang memberikan jawaban Baik, dan untuk jawaban Kurang Baik sebanyak 45 orang serta 11 orang lainnya memberikan jawaban Kurang Baik. Kemudian untuk item pertanyaan kedua mengenai meningkatkan usaha sector informal diperoleh data bahwa sebanyak 25 orang memberikan jawaban Baik, 55 orang memberikan jawaban Cukup Baik, dan 6 orang lainnya memberikan jawaban Kurang Baik. Dari hasil olahan data tersebut diperoleh skor 382

Untuk mengetahui kesimpulan diperlukan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Skor Tertinggi} &= \text{Interval tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Responden} \\ &= 3 \times 2 \times 86 = 516 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor Terendah} &= \text{Interval terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} \times \text{Responden} \\ &= 1 \times 2 \times 86 = 172 \end{aligned}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori Skor}}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{516 - 172}{3} = 114$$

Sehingga diperoleh kategori penilaian skor pada tabel di bawah :

Interval Skor	Kategori
402 - 516	Baik
287 - 401	Cukup Baik
172 - 286	Kurang Baik

Berdasarkan keterangan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada indikator mendorong berkembangnya usaha mikro diperoleh skor dengan angka 382 yang artinya indikator ini dikategorikan dalam penilaian “**Cukup Baik**”

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Sujiono selaku Kepala Desa Tanjung Medan dan selaku Penasehat BUMDes Kembang Setanjung mengenai indikator mendorong berkembangnya usaha mikro di peroleh informasi sebagai berikut:

“Menurut beliau, BUMDes menjalin hubungan dengan pelaku ekonomi dalam berbagai bidang sehingga melalui unit simpan pinjam masyarakat dapat menjalankan roda ekonomi dengan baik sehingga semakin banyak peluang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang halal untuk

kesejahteraan masyarakat sendiri. Peran BUMDes dalam memberikan barang dan jasa dengan harga yang sama dengan pasar sudah dilakukan oleh BUMDes dilihat dari unit LPG.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan direktur BUMes Kembang Setanjung Bapak Ahmad Suheri, SE adalah sebagai berikut:

“Dalam meningkatkan usaha masyarakat Dalam Mengelola potensi ekonomi Desa sangat diharapkan agar masyarakat dapat memanfaatkan sumber Daya Alam yang tersedia di Desa Tanjung Medan, dan lebih mengutamakan produk lokal sehingga BUMDes akan lebih mudah untuk membantu dalam melakukan pemasaran dan melakukan dalam hal untuk meningkatkan produktifitas dengan melakukan pelatihan-pelatihan”.

Kemudian berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bumdes Kembang Setanjung memberikan barang dan jasa dengan harga yang sama dengan harga pasar. Tetapi seharusnya BUMDes memberikan harga yang lebih murah dibanding dengan harga jual dipasaran.

4. Sebagai Sumber Dana Yang Dialokasikan Untuk Kepentingan Masyarakat

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembanga

n usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa).

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Sebagai Sumber Dana Yang Dialokasikan Untuk Kepentingan Masyarakat

No	Sub Indikator	Taangapan Responden			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mempermudah memenuhi kebutuhan	20	57	9	86
2	Memberikan kebutuhan sosial	35	45	6	86
Jumlah		55	102	15	172
Skor		165	204	15	384
Kategori		Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dilihat dari tabel V.8 diketahui dari indikator ini di ajukan 2 item pertanyaan kepada 86 orang responden, untuk item pertanyaan pertama, mengenai Memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya penulis memperoleh data bahwa 20 orang memberikan jawaban Baik, 57 orang meberikan jawaban Cukup Baik serta 15 orang lainnya memberikan jawaban Kurang Baik.

Dan pada pertanyaan ke dua mengenai Memberikan kebutuhan sosial kepada masyarakat dapat dilihat bahwa 35 orang memberikan jawaban Baik, kemudian 15 orang memberikan jawaban Kurang Baik. Berdasarkan data tersebutlah penulis memperoleh skor dengan angka 384.

Untuk mengetahui kesimpulan diperlukan rumus sebagai berikut :

$$\text{Skor Tertinggi} = \text{Interval tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Responden}$$

$$= 3 \times 2 \times 86 = 516$$

Skor Terendah = Interval terendah x jumlah pertanyaan x Responden

$$= 1 \times 2 \times 86 = 172$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori Skor}}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{516 - 172}{3} = 114$$

Sehingga diperoleh kategori penilaian skor pada tabel di bawah :

Interval Skor	Kategori
402 - 516	Baik
287 - 401	Cukup Baik
172 - 286	Kurang Baik

Dengan acuan tabel kategori penilaian skor di atas pada indikator sebagai sumbe dana yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat berdasarkan hasil kuisisioner yang diajukan penulis diperoleh kesimpulan bahwa indikator tersebut berada dalam kategori penilaian “Cukup Baik” dengan nilai skor 384.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sujiono selaku Kepala Desa Tanjung Medan dan selaku Penasehat BUMDes Kembang Setanjung mengenai indikator mendorong berkemangnya usaha mikro di peroleh informasi sebagai berikut:

“ Menurut beliau mengenai pendapatan masyarakat sudah sangat baik hal ini dapat dilihat dari perkembangan Badan Usaha Milik Desa yang sudah menyubangkan PADes dan sudah digunakan dengan baik oleh pemerintah desa.”

5. Meningkatkan Kesempatan Berusaha

Adapun program yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam usaha meningkatkan kesempatan berusaha adalah dengan cara memanfaatkan potensi ekonomi yang berada di Desa Tanjung Medan tersebut.

Hasil tanggapan responden tentang indikator Meningkatkan kesempatan berusaha di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Meningkatkan Kesempatan Berusaha

No	Sub Indikator	Tanggapan Responden			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelatihan dasar mengelola usaha	15	60	11	86
2	Pengawasan	10	70	6	86
Jumlah		25	130	17	172
Skor		75	260	17	352
Kategori		Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Pada tabel V.9 diketahui jumlah responden 86 orang dengan dua item pertanyaan yang diajukan oleh penulis yaitu item pertama mengenai memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada masyarakat agar dapat mengelola usaha penulis memperoleh data 15 orang memberikan jawaban Baik, 60 orang memberikan jawaban Kurang Baik, kemudian 11 orang lainnya memberikan jawaban Kurang Baik.

Pada item pertanyaan ke dua mengenai Melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang sudah melakukan peminjaman dapat dilihat bahwa 10 orang dari jumlah responden memberikan jawaban Baik, 70 orang memberikan jawaban

Cukup Baik serta 6 orang lainnya memberikan jawaban Kurang Baik. Dari data inilah penulis berdasarkan olahan data yang dilakukan penulis diperoleh skor dengan angka 352.

Untuk mengetahui kesimpulan diperlukan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Skor Tertinggi} &= \text{Interval tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Responden} \\ &= 3 \times 2 \times 86 = 516 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor Terendah} &= \text{Interval terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} \times \text{Responden} \\ &= 1 \times 2 \times 86 = 172 \end{aligned}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori Skor}}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{516 - 172}{3} = 114$$

Sehingga diperoleh kategori penilaian skor pada tabel di bawah :

Interval Skor	Kategori
402 - 516	Baik
287 - 401	Cukup Baik
172 - 286	Kurang Baik

Dalam hal ini dengan berpedoman pada tabel penilaian skor di atas pada indikator meningkatkan kesempatan berusaha diperoleh skor 352 yang mana skor tersebut berada dalam interval skor dengan kategori “**Cukup Baik**”

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sujiono selaku Kepala Desa Tanjung Medan dan sebagai Penasehat BUMDes Kembang Setanjung mengenai indikator Meningkatkan kesempatan berusaha di peroleh informasi sebagai berikut.

“Menurut beliau tentang komitmen BUMDes dalam pembinaan ekonomi kepada, melaksanaksn pemberdayaan ekonomi desa sudah tertuang dalam ADART, sehingga masyarakat mendapatkan berbagai bentuk pembinaan dan pemberdayaab dalam upaya pengembangan usaha masyarakat, serta komitmen BUMDes dalam mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa”

Wawancara yang penulis telah lakukan dengan direktur BUMDes Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yaitu Bapak Ahmad Suheri, SE dalam hal ini berikut penuturan beliau :

“BUMDes sangat berkomitmen dalam pembinaan perekonomian di desa, yang mana BUMDes bergerak dalam semua bidang misalnya bidang pertanian, perkebunan, budidaya ikan, peternakan dan lain sebagainya sehingga masyarakat dapat membangun usahanya dengan lebih semangat, selain itu unit usaha yang didirikan BUMDes telah sesuai dengan standar uji kelayakan”.

Dengan demikian dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa BUMDes Kembang Setanjung sudah meningkatkan peluang ekonomi kreatif dengan melaksanakan program-program yang sudah direncanakan.

6. Membantu pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Peran Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membantu Pemerintah Desa dalam menanggulangi kemiskinan. Berikut dibawah ini hasil jawaban kuisisioner oleh responden :

Tabel V.10 : Distribusi Tanggapan Responden Membantu Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan

No	Sub Indikator	Tanggapan Responden			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sosialisasi keberadaan BUMDes	20	57	9	86
2	Pelatihan tim pembimbing	10	48	28	86
Jumlah		30	105	37	172
Skor		90	210	37	337
Kategori		Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dilihat dari tabel V.10 pada indikator membantu pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan ada dua item pertanyaan yang penulis ajukan kepada 86 orang responden, untuk item pertanyaan pertama mengenai memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap keberadaan BUMDes diperoleh data sebanyak 20 orang memberikan jawaban Baik, 57 orang memberikan jawaban Cukup Baik serta 9 orang lagi memilih memberikan jawaban Kurang Baik.

Dan untuk item pertanyaan ke dua tentang memberi pelatihan kepada tim pembimbing penulis memperoleh data bahwa 10 orang dari jumlah responden memberikan jawaban Baik, 48 orang memberikan jawaban Cukup Baik emudian 28 orang lainnya memberikan jawaban Kurang Baik. Dengan data tersebut penulis memperoleh skor dengan angka 337.

Untuk mengetahui kesimpulan diperlukan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Tertinggi} &= \text{Interval tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Responden} \\
 &= 3 \times 2 \times 86 = 516
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor Terendah} &= \text{Interval terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} \times \text{Responden} \\ &= 1 \times 2 \times 86 = 172 \end{aligned}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori Skor}}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{516 - 172}{3} = 114$$

Sehingga diperoleh kategori penilaian skor pada tabel di bawah :

Interval Skor	Kategori
402 – 516	Baik
287 - 401	Cukup Baik
172 - 286	Kurang Baik

Dengan mengacu pada tabel penilaian di atas pada indikator membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan berdasarkan skor yang di peroleh oleh penulis yaitu 337 dimana skor ini berada dalam kategori penilaian “Cukup Baik”. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa indikator tersebut berdasarkan penilaian responden adalah “**Cukup Baik**”.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sujiono selaku Kepala Desa Tanjung Medan dan sebagai Penasehat BUMDes Kembang Setanjung mengenai indikator Meningkatkan kesempatan berusaha di peroleh informasi sebagai berikut:

“Menurut beliau, sudah diberikan sosialisai terhadap keberadaan BUMDes Kembang Setanjung, dan masyarakat juga sudah mengetahuinya, saya pastikan Seluruh masyarakat Desa sudah mengetahui keberadan BUMDes dan juga program-program nya, dan hampir semua Kepala Keluarga sudah pernah meminjam di BUMDes Kembang Setanjung”

7. Membuka Lapangan Kerja

Peran Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung dalam membuka lapangan pekerjaan merupakan upaya yang akan di lakukan oleh BUMDes untuk masyarakat Desa demi kesejahteraan masyarakat Desa.

Adapun program yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung yaitu membuka lapangan pekerjaan yang halal sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat.

Hasil tanggapan responden tentang indikator membuka lapangan kerja di Desa Tanung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan HUU sebagai berikut:

Tabel V.11 : Distribusi Tanggapan Responden Membuka Lapangan Kerja

No	Sub Indikator	Tanggapan Responden			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menciptakan lapangan kerja	25	40	21	86
2	Menyediakan Barang dan jasa	10	30	46	86
Jumlah		35	70	67	172
Skor		105	140	67	312
Kategori		Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dilihat dari tabel V.11 pada indikator membuka lapangan kerja dengan 2 item pertanyaan yaitu Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat berdasarkan kuisioner sebanyak 25 orang memberikan jawaban Baik, 40 orang memberikan jawaban Cukup Baik serta 21 orang lagi dengan jawaban Kurang Baik.

Kemudian untuk item ke dua mengenai menyediakan barang dan jasa sebanyak 10 orang memberikan jawaban Baik, 30 orang memberikan jawaban Cukup Baik dan 46 orang lainnya memilih memberikan jawaban Kurang Baik. dari hasil data diatas penulis memperoleh skor dengan angka 312.

Untuk mengetahui skor kategori penilaian indikator diperlukan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Skor Tertinggi} &= \text{Interval tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Responden} \\ &= 3 \times 2 \times 86 = 516 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor Terendah} &= \text{Interval terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} \times \text{Responden} \\ &= 1 \times 2 \times 86 = 172 \end{aligned}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori Skor}}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{516 - 172}{3} = 114$$

Sehingga diperoleh kategori penilaian skor pada tabel di bawah :

Interval Skor	Kategori
402 - 516	Baik
287 - 401	Cukup Baik
172 - 286	Kurang Baik

Dengan berbedoman pada tabel dia atas pada indikator membuka lapangan pekerjaan dengan skor 312 yang berada dalam kategori penilaian cukup baik, sehingga dapat diartikan bahwa indikator tersebut memiliki nilai “**Cukup Baik**” dimata responden.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan direktur BUMes Kembang Setanjung Bapak Ahmad Suheri, SE adalah sebagai berikut:

“Menurut beliau, BUMDes menjalin hubungan dengan pelaku ekonomi dalam berbagai bidang sehingga melalui unit simpan pinjam masyarakat dapat menjalankan roda ekonomi dengan baik sehingga semakin banyak peluang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang halal untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Medan yaitu Bapak Sujiono sebagai berikut:

“Menurut beliau Badan Usaha Milik Desa sudah menjalankan apa yang telah dikomitmen kan dari awal untuk menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya sehingga mengurangi jumlah pengangguran didesa dan dapat mengangkat perekonomian masyarakat”

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa dengan adanya BUMDes ini dan kegiatan dari BUMDes sudah memberikan dampak positif dalam hal menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Rokan Hulu.

Tabel V.12 : Tabel Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden NasabahTerkait Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

No	Indikator	Tanggapan Responden			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa	35	81	56	172
2	Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif	51	90	31	172
3	Mendorong berkembangnya	55	100	12	172

	usaha mikro				
4	Sebagai sumber dana yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat	55	102	15	172
5	Meningkatkan kesempatan berusaha	25	130	12	172
6	Membantu pemerintah Desa dalam menanggulangi kemiskinan	30	105	37	172
7	Membuka lapangan kerja	35	70	67	172
Jumlah		286	678	230	1.194
Skor		858	1.356	230	2.444
Kategori		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dari data tabel diatas dapat di jelaskan mengenai Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dengan 7 buah indikator, diperoleh data skor 858 pada kategori penilaian Baik, 1.356 pada kategori penilaian Cukup Baik, dan pada kategori Kurang Baik dengan skor 230. Sehingga diperoleh skor keseluruhan dari variabel Evaluasi Pengelolaan BUMDes yaitu 2.444.

Untuk mengetahui skor kategori penilaian variabel digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Skor Tertinggi} &= \text{Interval tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Responden} \\ &= 3 \times 14 \times 86 = 3.612 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor Terendah} &= \text{Interval terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} \times \text{Responden} \\ &= 1 \times 14 \times 86 = 1.204 \end{aligned}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori Skor}}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{3.612 - 1.204}{3} = 802$$

Sehingga diperoleh kategori penilaian skor pada tabel di bawah :

Interval Skor	Kategori
2.810 - 3.612	Baik
2.007 - 2.809	Cukup Baik
1.204 - 2.006	Kurang Baik

Dengan pedoman tabel skor penilaian kategori variabel di atas jika dihubungkan dengan data skor hasil kuisisioner pada variabel Evaluasi Pengelolaan BUMDes dengan jumlah skor 2.444 yang berada dalam kategori penilaian Cukup Baik. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum terlaksana dengan baik atau belum efektif.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan dapat diketahui bahwa adanya kekurangan yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa yaitu kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pegawai dan kurang ketegasan yang dilakukan oleh pegawai atau sanksi yang diberikan kepada masyarakat atas penunggakan yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan menurut saya dari segi masyarakat terlihat melakukan tindakan menyalahgunakan dana yang dipinjamkan dan lari dari tujuan badan usaha milik desa.

B. Hasil Dan Pembahasan Uji Validitas

Dalam hal ini penulis melakukan pengujian terhadap item pertanyaan yang diberikan kepada responden.

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan alat ukur untuk melihat hasil pengukurannya dapat konsisten serta untuk mengetahui kevalidan kuisisioner yang disebarkan. Peneliti menyebarkan kuisisioner kepada 86 Responden yang merupakan Nasabah BUMDes Desa Tanjung Medan Tambusai Utara

Rokan Hulu. Dengan acuan dikatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel. Dan diketahui r tabel 0.2120 yaitu dari nilai r tabel $\alpha =$ dengan derajat $df = n-2 = 84$

NO	Indikator	Corrected Item-Total Corelation	Rtabel	Keterangan
1	Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa	0,263	0,212	Valid
		0,383		Valid
2	Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif	0,364		Valid
		0,300		Valid
3	Mendorong berkembangnya usaha mikro	0,297		Valid
		0,397		Valid
4	Sebagai sumber dana yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat	0,270		Valid
		0,314		Valid
5	Meningkatkan kesempatan berusaha	0,284		Valid
		0,399		Valid
6	Membantu pemerintah Desa dalam menanggulangi kemiskinan	0,268		Valid
		0,291		Valid
7	Membuka lapangan kerja	0,284		Valid
		0,268		Valid

Berdasarkan dari tabel uji validitas tersebut terbukti bahwa item pertanyaan yang setiap indikator memiliki 2 item pertanyaan dapat dikatakan valid di karenakan r Hitung lebih besar dari r Tabel dimana nilai r Tabel adalah 0,2120 sehingga item tersebut dapat dikatakan valid dan layak dijadikan item pengukuran penelitian.

C. Faktor-faktor penghambat

1. Kurangnya modal dari Badan Usaha Milik Desa sehingga banyak hal – hal yang masih dirasakan kurang, seperti di batasnya jumlah pinjaman kepada masyarakat.
2. Masih banyaknya masyarakat yang belum percaya diri untuk membuka usaha, hal ini disebabkan adanya pemikiran ragu atau takut modal yang dikeluarkan tidak kembali karena naik turunnya penjualan.
3. Kurangnya ketegasan pengurus BUMDesa dalam menjalankan tugasnya, hal ini terlihat masih adanya masyarakat menunggak dalam penjaminan modal dalam waktu yang lama malah sudah jatuh tempo
4. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan produk lokal belum terlaksana dengan baik, hal ini terbukti belum adanya pemasaran produk lokal ke luar daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu “cukup baik” Hal ini di dapatkan dengan alasan bahwa pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang Setanjung Di Desa Tanjung Medan sudah berjalan cukup baik, dan proses simpan pinjam juga sudah berjalan dari tahun 2015 hingga saat ini, akan tetapi di dalam pelaksanaannya beberapa tugas dan fungsi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang Setanjung belum dilaksanakan dengan baik, terkait dengan “Pembayaran Kredit” yang dilakukan oleh nasabah, dimana masih banyak nasabah yang melakukan penunggakan dan belum di tindak lanjut oleh pihak pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .

1. Indikator mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa berada pada kategori cukup baik dengan interval skor 323. Dimana kegiatan BUMDes tersebut memang sudah di realisasikan secara terang-terangan tetapi prgram tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Indikator meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif berada pada kategori cukup baik dengan interval skor 364. Dimana BUMDes kembang setanjung sudah meningkatkan perekonomian

masyarakat tetapi BUMDes kembang setanjung belum memberi praktek dan pelatihan dikarenakan terkendala fasilitas.

3. Indikator berkembang usaha mikro berada pada kategori cukup baik dengan interval skor 382. Dimana BUMDes kembang setanjung memberikan barang dan jasa dengan harga yang sama dengan pasar. tetapi seharusnya BUMDes memberikan harga yang lebih murah dibanding dengan harga jual dipasaran.
4. Indikator sebagai sumber dana yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat berada pada kategori cukup baik dengan interval skor 384
5. Indikator meningkatkan kesempatan berusaha berada pada kategori cukup baik dengan interval skor 352. Dimana diketahui bahwa BUMDes kembang setanjung sudah meningkatkan peluang ekonomi kreatif dengan melaksanakan program-program yang sudah direncanakan.
6. Indikator pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan berada pada kategori cukup baik dengan interval skor 337
7. Indikator membuka lapangan kerja berada pada kategori cukup baik dengan interval skor 312. Dimana dengan adanya BUMDes ini dan kegiatan dari BUMDes sudah memberikan dampak positif dalam hal menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

sekeseluruhan indikator dapat disimpulkan bahwa sudah **cukup baik**. Hal ini karena dari pihak pegawai atau staf sudah baik dalam pelayanan kepada masyarakat yang meminjam dana dengan Unit Usaha Simpan Pinjam. Penulis

melihat adanya kekurangan yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa yaitu kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pegawai dan kurang ketegasan yang dilakukan oleh pegawai atas sanksi yang diberikan kepada masyarakat atas penunggakan yang dilakukan oleh masyarakat pada unit USP. Sedangkan menurut hasil dari penelitian yang telah dilakukan dari segi masyarakat terlihat melakukan tindakan menyeleweng atas dana yang dipinjam dengan menyalahgunakan dana dari tujuan awal. Dari teori yang digunakan oleh penulis yaitu tujuh kewajiban bahwa menurut hasil penelitian yang telah dilakukan dari segi pegawai semua sudah terlaksana dengan baik, dan dari segi masyarakat cukup berperan dilakukan. Adapun dari segi pegawai sudah dilaksanakan tetapi ada sedikit kekurangan yaitu pengawasan yang masih belum maksimal yang dilakukan kepada masyarakat yang memanfaatkan dana BUMDes

B. SARAN

Adapun saran penulis dalam Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu adalah

1. Perlunya sikap tegas yang akan dikeluarkan oleh pihak BUMDesa dan Unit Usaha Simpan Pinjam dalam pengawasan yang dilakukan kepada pihak yang menunggak di unit USP sehingga unit USP terbebas dari tunggakan yang tergolong besar.
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) memberikan pembekalan atau pelatihan - pelatihan kepada masyarakat yang telah memanfaatkan dana

USP sehingga masyarakat lebih mendapatkan skill yang baik dalam pengembangan usahanya.

3. Perlunya sikap tegas yang akan dikeluarkan oleh pihak BUMDesa dan Unit Usaha Simpan Pinjam dalam pengawasan yang dilakukan kepada pihak yang menunggak di unit USP sehingga unit USP terbebas dari tunggakan yang tergolong besar.
4. Perlu adanya upaya dari BUMDesa untuk meningkatkan dan mengembangkan produk lokal desa Pangkalan Jambi sehingga dapat dipasarkan ke luar kota malah keluar daerah adalah :

DAFTAR KEPUSTAKA

Buku-Buku

- Prof.Dr.Sondang P.Siagian,M.P,1999. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Arif, Muhammad. 2007, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kebuayaan Desa*, Riau, Redpost Press
- Ancok, Djamaludin, 2012. *Psikologi Kepemimpinan & Inovasi*, Jakarta Erlangga
- David Wijaya,S.E.,M.M, 2018.*Badan Usaha Milik Desa*,Yogyakarta : Gava Media
- Dr.Icuk Rangga Bawono,Erwin Setyadi,2019. *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo
- Drs.H.Inu Kencana Syafiie,M.Si,2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta : PT.Bumi Aksara
- Dr.H.A.Tarmizi Yussa,Ma,Hendri Andry,S.Sos,Msi, *Perilaku etika administrasi publik*,Pekan Baru : 2015
- Dr.Icuk Rangga Bawono,Erwin Setyadi,2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta : PT. Grasindo
- Hasibuan, Melayu S.P. 2014. *Manajemen dasar,Pengertia,dan Masalah*, Jakarta, Bumi Aksara.

Samsudin, Sadi. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung, CV Pustaka Setia

Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi Edisi Refis*, Jakarta. Bumi Aksara

Sufian, 1997, *Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru, UIR Press

Syafii, Ilmu Kencana 2006. *Ilmu Administasi Publik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
Ilmu Politik. Jakarta, Rineka Cipta

Syafrudin, Ateng. 1993. *Pengaturan Koordinasi Pemerintah Di Daerah*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Thoha , Miftah. 2007. *Kepemimpinan Dan Manajemen*. Jakarta, PT, Rajagrafindo Persada

Thoha, Miftah. 2011, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

William N Dumm, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Wirawan . 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta . PT Raja Grafindo Persada.

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Administasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

DOKUMENTASI :

UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa

Permendes No. 02 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Bupati NO. 64 Tahun 2014